



Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Pembinaan Kemandirian Garmen Guna Meningkatkan Lifeskill di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Yunan Fariz Jabo¹, Andi Kurniawan²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: yunanfarizjabo@gmail.com, akatigatujuh@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 02 Oktober 2025

ABSTRACT

The research is motivated by the critical role of inmate rehabilitation in social reintegration, with the garment sector selected due to its labor-intensive nature and practical skill development potential. This study examines the application of collaborative governance in fostering garment industry-based vocational training to enhance the life skills of inmates at Class I Makassar Correctional Facility. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving inmates, correctional officers, and private sector partners (CV. Amura Pratama). Findings indicate that collaborative governance effectively improves inmates' competencies, including technical skills (sewing, pattern-making), interpersonal skills (teamwork, communication), problem-solving (production troubleshooting), and civility/ethics training (discipline, accountability). However, challenges such as limited facilities, inmate motivation, and partnership coordination persist. The study concludes that collaboration among the correctional institution, private sector, and inmates successfully establishes a holistic rehabilitation environment, though infrastructure enhancement and sustained commitment are needed for program optimization.

Keywords: Collaborative Governance, Independence Development, Garment Industry

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pembinaan narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial, di mana industri garmen dipilih karena potensinya dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan keterampilan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk pembinaan menganalisis pendekatan *collaborative* kemandirian industri garmen untuk meningkatkan lifeskill narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap narapidana, petugas Lapas, dan mitra swasta (CV. Amura Pratama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* efektif dalam meningkatkan keterampilan narapidana, meliputi technical skill (menjahit, membuat pola), interpersonal skill (kerja tim, komunikasi), problem solving (mengatasi kendala produksi), serta civility dan ethics training (disiplin, tanggung jawab). Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, motivasi narapidana, dan koordinasi dengan mitra. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Lapas, pihak swasta, dan narapidana berhasil menciptakan lingkungan pembinaan yang holistik, meskipun perlu penguatan dalam aspek sarana prasarana dan komitmen berkelanjutan untuk optimalisasi program.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pembinaan Kemandirian, Industri Garmen

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap individu yang pernah melakukan pelanggaran hukum. Paradigma pemidanaan di Indonesia telah mengalami pergeseran sejak dicetuskannya konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1963, yang menekankan bahwa narapidana bukan sekadar objek penjeratan, melainkan subjek yang harus dibina agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Pergeseran ini sejalan dengan perspektif global yang menempatkan rehabilitasi sebagai inti dari sistem pemasyarakatan modern (Robbins, 2015). Dalam konteks tersebut, hukuman penjara diarahkan pada proses pendidikan moral, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan sehingga narapidana memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah bebas.

Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup penguatan nilai spiritual, pendidikan moral, serta peningkatan kesadaran hukum dan norma sosial, sedangkan pembinaan kemandirian berfokus pada pelatihan keterampilan kerja dan usaha produktif yang dapat digunakan setelah bebas (Sujoko, 2021). Kedua dimensi ini membutuhkan keterlibatan multiaktor – petugas pemasyarakatan, masyarakat, serta pihak eksternal – agar proses pembinaan lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial bergantung pada kesiapan individu dalam menguasai keterampilan yang diakui pasar serta adanya dukungan sosial yang memadai (Mohajan, 2018).

Dalam implementasinya, pembinaan narapidana sering menghadapi berbagai kendala. Lapas di Indonesia masih bergelut dengan masalah klasik seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana, dan minimnya dukungan anggaran (Fatahilah, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan variasi program dan kualitas pelatihan yang diberikan. Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative governance menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut, karena memungkinkan adanya kolaborasi lintas sektor antara lembaga negara, swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Pendekatan ini terbukti memperkuat legitimasi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses sumber daya bagi program pembinaan (Beyers, 2024).

Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan di lembaga pemasyarakatan adalah industri garmen. Industri ini dikenal padat karya, memiliki prospek ekonomi luas, serta relevan dengan kebutuhan pasar domestik maupun global. Program pelatihan berbasis garmen memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh keterampilan menjahit, membuat pola, serta mengelola produksi. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa pelatihan vokasional yang terintegrasi dengan pasar kerja nyata dapat meningkatkan peluang kerja mantan narapidana hingga 40% lebih tinggi dibandingkan mereka

yang tidak mengikuti program serupa (Sumaryono, 2024). Dengan demikian, pembinaan berbasis industri garmen dapat menjadi strategi rehabilitasi yang tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

Meskipun demikian, efektivitas program pelatihan garmen di lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari berbagai tantangan. Faktor penghambat antara lain keterbatasan fasilitas produksi, kurangnya instruktur profesional, motivasi yang rendah dari sebagian narapidana, serta stigma masyarakat terhadap produk hasil karya warga binaan (Syawal, 2022). Stigma sosial menjadi isu krusial karena dapat menghambat pemasaran produk dan menurunkan rasa percaya diri narapidana. Beberapa penelitian internasional juga menemukan bahwa faktor penerimaan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana (Wulandari, 2023; Suprpto, 2024). Oleh karena itu, penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan ini.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pendekatan *collaborative governance* dalam pembinaan kemandirian narapidana melalui industri garmen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan *lifeskill* narapidana melalui sinergi antara lembaga pemasyarakatan, mitra swasta, dan narapidana sendiri. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana *collaborative governance* mampu meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis narapidana serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka secara lebih efektif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti, khususnya mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pembinaan kemandirian garmen guna meningkatkan *lifeskill* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan induktif, lebih menekankan pada pemahaman makna, proses, serta interaksi yang terjadi di antara partisipan daripada sekadar angka atau data statistik. Peneliti berupaya menafsirkan pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang dialami narapidana, petugas lapas, maupun mitra eksternal yang terlibat, dengan tujuan menggambarkan situasi nyata secara komprehensif tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, sehingga mampu menangkap nuansa, pengalaman, serta makna yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif. Desain penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih karena fleksibel dan memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi lapangan, sekaligus memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali lebih jauh faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan program. Dengan demikian, metode ini tidak hanya membantu memahami efektivitas pembinaan kemandirian narapidana, tetapi juga

menyoroti kontribusi kolaborasi antar pihak dalam menciptakan dampak positif berupa peningkatan keterampilan, kesiapan kerja, dan proses reintegrasi sosial setelah bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan collaborative governance berpengaruh dalam meningkatkan lifeskill narapidana di Lapas Kelas I Makassar

Pendekatan *collaborative governance* dalam program pembinaan garmen di Lapas Kelas I Makassar menjadi contoh nyata kolaborasi efektif antara lembaga masyarakat dengan pihak swasta, yaitu CV Amura Pratama. Melalui sinergi ini, Lapas menyediakan infrastruktur dan tenaga kerja narapidana, sementara CV Amura menghadirkan pelatihan teknis, peralatan, standar industri, serta akses pasar. Kerja sama ini mampu mengatasi ketimpangan sumber daya dan menciptakan lingkungan pembinaan yang holistik. Narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan menjahit sesuai standar industri, tetapi juga mendapat kesempatan membangun kepercayaan diri dan prospek reintegrasi sosial yang lebih baik setelah bebas. Faktor awal yang menjadi dasar keberhasilan program ini adalah kondisi awal kemitraan yang berangkat dari perbedaan kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya. CV Amura menghadirkan keterampilan dan akses industri, sementara Lapas memfasilitasi tenaga kerja binaan. Meskipun sempat menghadapi kendala dalam tahap pelatihan awal, secara bertahap narapidana berhasil menguasai keterampilan menjahit hingga mampu menghasilkan produk berkualitas dan bersaing di pasaran. Tantangan berupa stigma masyarakat terhadap produk narapidana perlahan dapat diatasi dengan kualitas nyata hasil karya. Program ini juga memberikan manfaat timbal balik, di mana pihak swasta memperoleh tenaga kerja terlatih dengan biaya efisien, sedangkan Lapas berhasil menjalankan mandat pembinaan kemandirian warga binaannya.

Kepemimpinan yang diterapkan bersifat fasilitatif dengan pembagian peran yang jelas. Lapas aktif mengoordinasikan kegiatan harian, melakukan pengawasan, serta menjaga kedisiplinan, sedangkan CV Amura fokus pada aspek teknis produksi. Dalam praktiknya, sebagian besar pengawasan dan pengelolaan operasional dilakukan oleh narapidana senior yang dipercaya sebagai koordinator, menciptakan hierarki kerja internal yang efektif. Sistem disiplin dan absensi transparan juga diterapkan, sehingga tercipta keseimbangan antara motivasi ekstrinsik berbasis reward and punishment dengan dukungan institusional dari Lapas. Pendekatan ini memperlihatkan perpaduan antara tata kelola kolaboratif dan struktur otoritas tradisional yang tetap menjaga ketertiban dan produktivitas. Struktur kelembagaan yang dibangun semakin memperkuat keberhasilan program. Aturan kerja yang jelas, tata tertib operasional, hingga kontrak kerja sama formal antara Lapas dan CV Amura menjadi landasan kuat yang menciptakan transparansi serta akuntabilitas. Program ini dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas, di mana seluruh narapidana memiliki kesempatan untuk belajar, sementara pelatihan diberikan oleh tutor profesional dari luar dan

didukung mekanisme regenerasi keterampilan melalui narapidana yang sudah mahir. Forum pertemuan rutin mingguan, baik secara langsung maupun daring, memastikan komunikasi berjalan intensif dan setiap kendala dapat segera diatasi. Evaluasi berkelanjutan dilakukan dengan menilai kualitas, kerapian, dan kecepatan produksi, memberikan umpan balik yang membangun bagi narapidana. Proses kolaboratif ini menghasilkan sinergi yang kuat melalui komunikasi intensif, keterbukaan, dan komitmen jangka panjang. Lapas dan CV Amura sama-sama menjaga transparansi serta reputasi program, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga berfokus pada misi sosial pembinaan. Target pengembangan usaha ke depan, termasuk kemungkinan ekspor, menunjukkan keberlanjutan program yang terus dievaluasi dan diperbaiki bersama. Sosialisasi intensif kepada warga binaan baru turut memperkuat pemahaman tentang nilai keterampilan yang diperoleh, sekaligus meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi. Hasil nyata terlihat dari narapidana yang berhasil mengembangkan keterampilan menjahit dari nol hingga mahir, bahkan beberapa di antaranya mampu membuka usaha mandiri setelah bebas.



Gambar 1.1 Perjanjian Kerja Sama Antara Lapas Kelas I Makassar dan CV. Amura Pratama

Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, pembagian tanggung jawab antara kedua belah pihak diatur secara rinci. Lapas Kelas I Makassar bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelatihan, ruang produksi, dan pengawasan kegiatan. Program pembinaan garmen di Lapas Kelas I Makassar telah membuahkan hasil nyata baik pada level institusional maupun individual. Dari sisi institusional, produk garmen yang dihasilkan telah dipercaya oleh berbagai kampus di Makassar, menunjukkan adanya pengakuan eksternal terhadap kualitas produksi narapidana. Kepercayaan ini mencerminkan legitimasi sosial yang berhasil dibangun melalui konsistensi mutu dan profesionalitas kerja sama dengan CV Amura Pratama. Sementara itu, pada level individual, narapidana mengalami transformasi signifikan, mulai dari penguasaan

keterampilan dasar menjahit, pengoperasian mesin, hingga pembuatan pola yang kompleks. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya mengubah mereka menjadi tenaga terampil, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk mandiri setelah bebas. Bahkan, sebagian alumni telah berhasil membuka usaha penjahitan maupun bekerja di bidang tekstil, membuktikan bahwa keterampilan yang diperoleh benar-benar aplikatif dalam kehidupan nyata. Transformasi ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi antara Lapas dan mitra swasta mampu mengintegrasikan misi bisnis dengan tujuan rehabilitasi, sehingga tercipta manfaat ganda yang saling menguntungkan.

Hasil yang dicapai juga terlihat dari peningkatan kualitas produk garmen yang semakin hari semakin baik, rapi, dan memenuhi standar nasional menurut penilaian mitra swasta. Hal ini menandakan adanya proses pembelajaran berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga membangun soft skills seperti disiplin, tanggung jawab, kerja tim, komunikasi, serta kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, program ini menanamkan nilai-nilai etika kerja melalui pembiasaan sehari-hari dan aturan yang disusun bersama, sehingga membentuk budaya kerja positif yang sopan, ramah, dan profesional. Kombinasi keterampilan teknis, sosial, dan etika ini menjadikan narapidana tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan norma masyarakat. Dengan terciptanya alumni yang mandiri secara ekonomi, keberhasilan program garmen menunjukkan adanya dampak berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial sistem pemasyarakatan. Peningkatan kapasitas individu secara simultan memperkuat kapasitas kelembagaan Lapas dalam menyelenggarakan pembinaan berbasis *collaborative governance*, sekaligus menjadikan model ini sebagai rujukan dalam upaya rehabilitasi narapidana yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Faktor penghambat program kemandirian garmen dalam pengembangan lifeskill narapidana setelah melakukan collaborative governance di Lapas Kelas I Makassar

Program pembinaan kemandirian garmen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar melalui kerja sama dengan CV Amura Pratama menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan pertama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan banyaknya narapidana. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam hal pendampingan, karena petugas harus membagi perhatian antara tugas pengawasan keamanan, kegiatan administrasi, serta tanggung jawab pembinaan. Di sisi lain, sebagian besar petugas tidak memiliki keahlian khusus di bidang menjahit sehingga hanya berperan sebagai pengawas, bukan instruktur yang mampu memberikan pembinaan teknis secara mendalam. Akibatnya, proses pembelajaran yang dijalani narapidana menjadi kurang maksimal karena keterampilan yang diperoleh lebih bersifat dasar dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar profesional dunia kerja. Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa meskipun program secara formal dapat

berjalan, kualitas hasil pembinaan tidak selalu dapat dioptimalkan karena pendampingan teknis yang terbatas.

Selain hambatan internal dari pihak lembaga, keterbatasan juga muncul dari kurangnya pendampingan intensif oleh pihak mitra swasta. Kehadiran pelatih profesional dari CV Amura Pratama sangat jarang dilakukan, sehingga proses pelatihan lebih banyak mengandalkan narapidana senior yang sebelumnya telah mengikuti program serupa. Mekanisme ini memang membantu menjaga keberlanjutan pembelajaran, tetapi menimbulkan masalah baru berupa inkonsistensi kualitas hasil kerja, karena narapidana senior tidak semuanya memiliki kemampuan setara dengan tenaga pelatih profesional. Ketiadaan evaluasi yang rutin dari pihak swasta membuat standar kualitas produk yang dihasilkan narapidana sulit untuk terjaga secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun masih belum sepenuhnya seimbang, karena kontribusi teknis mitra swasta belum optimal dalam mendukung penguasaan keterampilan secara menyeluruh. Dampaknya, hasil pelatihan lebih banyak bergantung pada pengalaman individual daripada adanya transfer keahlian yang terstruktur.

Hambatan lain yang turut berpengaruh adalah rendahnya motivasi sebagian narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Tidak semua peserta memiliki semangat dan konsistensi untuk hadir dan menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal. Sebagian narapidana bahkan sering meminta izin keluar lebih awal dengan alasan merasa lelah, jenuh, atau tidak berminat melanjutkan pelatihan. Rendahnya minat dan komitmen belajar ini mempersulit petugas dalam menjaga keberlangsungan program, karena penguasaan keterampilan menjahit membutuhkan ketekunan serta latihan yang berulang. Ketidaksiaran narapidana dalam memanfaatkan kesempatan pembinaan membuat proses pembelajaran berjalan tidak merata, di mana hanya sebagian peserta yang benar-benar berkembang keterampilannya. Hambatan motivasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan tenaga pendamping, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan mental dan kesadaran individu narapidana dalam menjalani proses pembinaan.

Selain faktor internal, hambatan eksternal juga memberi dampak besar, khususnya terkait penerimaan masyarakat terhadap produk hasil karya narapidana. Meskipun kualitas produk garmen yang dihasilkan telah cukup baik dan layak jual, stigma negatif dari masyarakat masih melekat. Saat pameran produk, banyak pengunjung ragu untuk membeli, bahkan memandang sebelah mata hasil kerja narapidana hanya karena berasal dari lembaga pemasyarakatan. Harga produk yang relatif lebih murah dibandingkan standar pasar justru menimbulkan keraguan mengenai kualitas, sehingga tidak sedikit calon pembeli menganggap hasil karya tersebut kurang bernilai. Stigma sosial semacam ini mengurangi peluang pemasaran dan mempersempit ruang bagi narapidana untuk menunjukkan kompetensi yang telah mereka pelajari. Hambatan ini memperlihatkan adanya jurang antara peningkatan keterampilan di dalam lapas dengan penerimaan nyata di masyarakat, yang pada akhirnya menghambat tujuan

utama program pembinaan, yaitu menyiapkan narapidana agar lebih siap bekerja dan mandiri setelah bebas.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program kemandirian garmen di Lapas Kelas I Makassar mencakup keterbatasan tenaga pendamping, minimnya kehadiran instruktur profesional dari mitra swasta, rendahnya motivasi sebagian narapidana, serta stigma negatif masyarakat terhadap produk hasil karya lapas. Keempat faktor ini saling terkait dan membentuk rantai masalah yang kompleks: keterbatasan tenaga pembina membuat proses pelatihan kurang mendalam, ketidakhadiran pelatih profesional melemahkan transfer keahlian, motivasi yang rendah mengurangi konsistensi belajar, sementara stigma sosial menghambat pemasaran produk. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan kemandirian tidak dapat dicapai hanya dengan menyediakan program, tetapi memerlukan sinergi yang lebih kuat, pendampingan profesional yang berkelanjutan, penguatan motivasi narapidana, serta strategi sosialisasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif. Dengan demikian, program kemandirian garmen memiliki potensi besar untuk berhasil, tetapi perlu upaya yang lebih komprehensif agar benar-benar mampu meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara lebih mandiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Collaborative Governance* antara Lapas Kelas I Makassar dan CV Amura Pratama dalam program pembinaan kemandirian garmen berhasil menciptakan sinergi yang efektif melalui lima dimensi utama, yakni *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, *collaborative process*, dan *outcomes*, di mana Lapas berperan dalam penyediaan SDM dan infrastruktur sedangkan CV Amura memberikan dukungan berupa pelatihan teknis, kurikulum, dan akses pasar dengan proses yang transparan, kepemimpinan yang partisipatif, serta desain kelembagaan yang inklusif. Program ini terbukti meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis narapidana, sekaligus membentuk karakter kerja yang disiplin dan profesional sehingga mampu menunjang reintegrasi sosial, yang tercermin dari keberhasilan sebagian alumni berwirausaha maupun bekerja di bidang garmen pascabebas. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan sumber daya petugas yang menghambat pendampingan teknis, rendahnya motivasi sebagian narapidana, minimnya keterlibatan langsung pelatih profesional yang menyebabkan proses belajar lebih bergantung pada narapidana senior, serta stigma negatif masyarakat terhadap produk hasil karya narapidana yang membatasi penerimaan pasar. Keempat tantangan ini saling terkait dan menciptakan kompleksitas yang harus diatasi agar program pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Amruddin. (2022). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. Pustaka Cendekia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance.
- Beyers, F. (2024). Collaborative governance and personal relationships for sustainability transformation in the textile sector. *Scientific Reports*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-64373-1>
- Creswell, J. W. (2018). A mixed-method approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Fatahilah, S. (2023). Pelaksanaan pembinaan kemandirian guna meningkatkan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>
- Fiantika. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Indah. (2022). Pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 356–363.
- Khamdan, M. (2024). Latihan kerja dan kegiatan produksi narapidana sebagai model pembinaan kemandirian dan pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri. *Jurnal Madani*, 6(2), 53–63. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.2219>
- Mohajan, H. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Economic Policy*, (2116), 0–33.
- Munandar, A. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. <http://bphn.go.id/data/documents/99pp057.pdf>
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- Pratama, I. N. (2023). Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif collaborative governance di Kota Mataram, 1, 61–77.
- Robbins, S. P. (2015). *Organizational Behavior*.
- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas kerjasama pihak ketiga dalam proses pembinaan warga binaan berbasis masyarakat (*Community Based Corrections*) Lapas

-
- Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535>
- Sari, L. N. (2021). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- Shafira. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pustaka Media. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sujoko, I. (2021). Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.
- Sumaryono. (2024). Digitalisasi manajemen sumber daya manusia (*Human Resource Management*) dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan in-role dan extra-role di bisnis garmen jadi (*Ready Made Garment*). *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JPMD)*, 2(1), 3–4. <https://doi.org/10.38035/jmpd.v1i3>
- Sunia, U. (2023). Model kemitraan dalam program pembinaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Suprpto, I. (2024). Strategi menghadapi bencana rob melalui collaborative governance. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7, 15461–15468.
- Syawal, F. (2022). Pengaruh upah terhadap motivasi kerja narapidana yang mengikuti pembinaan pabrik garmen di Lapas Kelas I Makassar. *Jurnal Maneksi: Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 11(2), 440–447.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (n.d.).
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 26–36.
- Zaki, M. G. S. (2022). Pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja dalam upaya meningkatkan keahlian sebagai bekal narapidana kembali ke masyarakat (Studi pada Rutan Kelas IIB Kebumen). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 301–309.